



JURNAL SIMBOLIKA
Research and Learning in Communication Study

Available online <http://ois.uma.ac.id/index.php/simbolika>

DOI: <https://doi.org/10.31289/simbolika.v6i1.3494>

**Komunikasi Mitigasi Bencana sebagai Kewaspadaan
Masyarakat Menghadapi Bencana**
**Communication on Disaster Mitigation as Community
Precautions in Disaster Management**

Dewi Kurniawati*

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 13 Februari 2020; Disetujui: 18 April 2020; Dipublish: 27 April 2020

*Corresponding Email: dewi.kurniawati@usu.ac.id

Abstrak

Indonesia adalah sebagai salah satu negara rawan bencana. Berbagai bencana selalu melanda setiap tahunnya. Selama tahun 2018, tercatat 1999 kejadian bencana di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring cuaca ekstrem yang melanda Indonesia. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penelitian ini membahas tentang Komunikasi Mitigasi Bencana sebagai Kewaspadaan Masyarakat Menghadapi Bencana di Kecamatan Sei Bingai dan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Dipilihnya dua lokasi ini untuk mewakili dua wilayah yang kondisi alamnya berbeda. Kecamatan Sei Bingai terletak di wilayah pegunungan, sedangkan Kecamatan Secanggang terletak di wilayah pantai, sehingga ketika bencana terjadi ada perbedaan jenis bencana yang melanda. Penelitian ini dilakukan untuk mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kita semua tidak berharap akan terjadi bencana di wilayah Indonesia, namun upaya mengantisipasi bencana perlu dilakukan agar masyarakat waspada dan siap siaga untuk menghadapi bencana yang akan terjadi. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat belum memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Lembaga formal dan non formal yang ada di wilayah mereka belum melakukan sosialisasi mitigasi bencana secara maksimal tentang pentingnya memiliki kewaspadaan terhadap bencana banjir dan tanah longsor.

Kata kunci: Mitigasi Bencana, Kewaspadaan Masyarakat

Abstract

Indonesia is one of the disaster prone countries. Various disasters are always struck annually. During the year 2018, recorded 1999 catastrophic events in Indonesia. This number is expected to continue to increase with the extreme weather that hit Indonesia. Disasters are events or sequences of events that threaten and disrupt the life and livelihoods of people caused by both natural factors and non-natural and human factors that result in the onset of human souls, damage Property loss, and psychological impacts. This study discusses disaster mitigation communication as public awareness facing disaster in Sei Bingai sub-district and Secanggang district of Langkat District. These two locations are chosen to represent the two regions where the natural conditions differ. Sei Bingai Subdistrict is located in the mountainous region, while Secanggang subdistrict is located in the coastal area, so when disasters occur there are different types of disasters that hit. This research was conducted to anticipate and increase public awareness in the face of disasters. We do not expect disaster in the Indonesian region, but disaster anticipating efforts need to be done so that people are alert and ready to be alert to face the disaster. The results of the study showed that the community did not have high awareness of flood disasters and landslides. Formal and non-formal institutions in their region have not carried out the maximum socialization of disaster mitigation about the importance of alertness to flood disasters and landslides

Keywords: Disaster Mitigation, Society Vigilance

How to Cite: Kurniawati, D. (2020). Komunikasi Mitigasi Bencana Sebagai Kewaspadaan Masyarakat Menghadapi Bencana. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*. 6(1): 51-58

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara rawan bencana. Berbagai bencana selalu melanda setiap tahunnya. Selama tahun 2018 tercatat 1.999 kejadian bencana di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring cuaca ekstrem yang sering melanda Indonesia. Dampak yang ditimbulkan bencana sangat besar. Tercatat 3.548 orang meninggal dunia (Data BNPB 2018). Yang masih segar dalam ingatan kita bencana yang terjadi di Indonesia: 1. Gempa Bumi NTB yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2018 menelan korban jiwa sebanyak 564 orang. 2. Gempa dan Tsunami serta Likuefaksi (Pencairan Tanah) Sulawesi Tengah yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 menelan korban jiwa tercatat sebanyak 2.113 orang meninggal dunia. 3. Tsunami Selat Sunda yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 yang menelan korban jiwa sebanyak 373 orang meninggal dunia.

Data bencana tersebut semakin menunjukkan bahwa negara kita rawan bencana. Secara umum tingkat kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana-bencana besar belum dapat mengantisipasi dengan baik. Hal ini terlihat dari kejadian bencana yang banyak menimbulkan korban dimana masyarakat yang terkena bencana merasa kebingungan dan panik berlarian ke segala arah untuk menghindari tsunami ataupun bencana lainnya. Tidak adanya jalur evakuasi yang jelas serta sosialisasi yang minim dari Lembaga Pemerintah maupun Lembaga non-Pemerintah sehingga memperparah kondisi masyarakat yang terkena bencana.

Langkat adalah salah satu Kabupaten terluas di Sumatera Utara selain Kabupaten Labuhan Batu dan Deli

Serdang. Kabupaten Langkat memiliki keunikan tersendiri dikarenakan wilayahnya terdiri dari daerah pegunungan dan pantai. Di Daerah Langkat terdapat Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) seluas lebih kurang 213,985 hektar; Kawasan Timur Laut seluas lebih kurang 9,520 hektar, Kawasan Penyangga seluas lebih kurang 7,600 hektar; Kawasan Hutan Bakau seluas lebih kurang 20,200 hektar; dan kawasan lain lebih kurang 14,927 hektar.

Langkat juga memiliki kawasan pantai pesisir laut yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Luas wilayah pesisir Kabupaten Langkat meliputi 8 kecamatan yaitu + - 1.697,039 km. Kondisi alam ini menimbulkan kerawanan jika terjadi longsor dan tsunami. Tak hanya itu, di Kecamatan Sei Bingai seringkali terjadi bencana yaitu air bah. Hal ini membuat warga yang menempati daerah Sei Bingai menjadi korban namun pola mitigasi bencana nya belum ada begitupun dengan Kecamatan Secanggang.

Dengan alasan ini peneliti mengambil 2 wilayah yang mewakili 2 keadaan alam di Kab.Langkat, yaitu Kecamatan Sei Bingai dan Kecamatan Secanggang. Kecamatan Sei Bingai terletak di wilayah pegunungan yang berbatasan dengan Kab.Karo dan berpotensi besar mengalami bencana seperti tanah longsor dan lain sebagainya. Kecamatan Secanggang terletak di wilayah pantai yang menuju berbatasan langsung dengan laut lepas dan kemungkinan akan terjadi tsunami, banjir atau bencana lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi

mitigasi bencana yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintahan maupun Non-Pemerintahan dalam menangani mitigasi bencana yang terjadi di wilayah Langkat 2. Untuk menganalisis bagaimana kewaspadaan dan kesiagaan masyarakat Kecamatan Sei Bingai dan Kecamatan Secanggang 3. Untuk mencari cara agar masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana menjadi masyarakat waspada dan siaga (MaWasGa) terhadap bencana yang kemungkinan akan melanda wilayah mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan di daerah rawan bencana di Kabupaten Langkat. Dipilihnya lokasi ini karena lokasi tersebut rawan akan bencana seperti tanah longsor, banjir dan lain-lain. Lokasi yang dipilih peneliti adalah Kecamatan Sei Bingai dan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Kecamatan Sei Bingai terletak di wilayah pegunungan, sedangkan Kecamatan Secanggang terletak di wilayah pantai, sehingga ketika bencana terjadi ada perbedaan jenis bencana yang melanda.

Peneliti dalam menentukan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan jumlah kuota sampel sebanyak 100 responden pada tiap lokasi penelitian sehingga jumlah responden secara keseluruhan adalah 200 responden. Pengambilan sampel ini didasari pada responden yang bertempat tinggal di lokasi rawan bencana seperti di pinggir sungai, di pinggir laut, di daerah perbukitan, dll.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dari 100 sampel yang menjadi responden di Kecamatan Sei Bingai dan 100 sampel yang menjadi responden di Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat maka diperoleh hasil penelitian yaitu menunjukkan usia responden di Kecamatan Sei Bingai dan Kecamatan Secanggang berbeda. Untuk Kecamatan Sei Bingai usia rata-rata berada pada usia produktif sedangkan Kecamatan Secanggang usia rata-rata masyarakat berada pada usia tidak produktif yaitu diatas 60 tahun. Untuk jenis kelamin responden, kedua wilayah ini sama-sama memiliki responden puan-puan. Hal ini bermakna mayoritas yang memiliki waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini adalah perempuan. Jumlah anggota keluarga sendiri, rata-rata keluarga memiliki banyak anak yaitu sekitar 5-6 orang. Untuk data pendidikan responden ada hal yang cukup menggembirakan kedua wilayah ini sudah memiliki pendidikan yang tamat S1 walaupun masih sedikit setidaknya ada. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan mereka baik. Untuk tingkat pekerjaan responden sesuai dengan keadaan wilayah masing-masing dimana Kecamatan Sei Bingai adalah daerah dataran tinggi yang cukup subur maka mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani. Sedangkan Kecamatan Secanggang yang berbatasan dengan Samudra Indonesia maka mayoritas warganya adalah sebagai nelayan. Data rumah yang berada pada

Kecamatan Sei Bingai dan Kecamatan Secanggang mayoritas merupakan kepemilikan pribadi dan memiliki rata-rata penghasilan sebesar Rp 1-3 Juta.

Komunikasi Mitigasi Bencana.

Komunikasi menurut Carl I Hovland (dalam Effendy, 2013) adalah upaya sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Secara khusus Hovland juga mengatakan definisi komunikasi adalah proses untuk mengubah perilaku orang lain. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa komunikasi meliputi proses penyampaian pesan, pembentukan kepercayaan, sikap, pendapat, serta tingkah laku orang lain dan juga publik. Hafida (2019). Dalam proses komunikasi yang terjalin ini, kemudian ada perubahan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, oleh karena begitu seringnya masyarakat menghadapi dan berada di daerah bencana.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (BNPB, 2012). Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari satu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko jangka panjang (Maryani, 2002). Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan non alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (BNPB, 2012). Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Komunikasi mitigasi bencana merupakan komunikasi yang dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya bencana (Haddow, 2014). Beberapa Aspek Komunikasi dan Koordinasi yang begitu urgent, terus dilakukan oleh masyarakat dalam penanganan bencana. (Rudianto, 2015; Lubis, Sabarina & Masri, 2019). Komunikasi kaitannya dengan mitigasi bencana sangat diperlukan karena adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian di lingkungan masyarakat sehingga dapat bertindak secara efektif. Dalam pencegahan bencana, informasi yang akurat dari pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah sangat diperlukan oleh masyarakat maupun lembaga swasta yang memiliki kepedulian besar terhadap peristiwa bencana tersebut. Dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa atau kerugian materi. Misalnya, Search And Rescue yang lebih dikenal dengan SAR sebagai sebuah organisasi yang memang berkecimpung di wilayah bencana, maka tidak heran jika SAR tetap mengadakan komunikasi dengan masyarakat yang berada di wilayah bencana untuk meminimalisir korban, (Sitorus, Hendra & Jamil, 2018).

Dari data responden yang kami kumpulkan, sebanyak 104 responden menyatakan tidak mengetahui mengenai

pengetahuan prosedur penyelamatan dari bencana alam yang terjadi. Saat kami menjelaskan perihal mitigasi bencana, sedikit sekali yang mengetahui bahwa ada tahapan-tahapan penanggulangan bencana seperti pra-bencana, saat kejadian bencana, dan juga pasca bencana.

Yang hanya mereka tahu bahwa pada saat kejadian bencana mereka harus menyelamatkan diri mereka dari bencana tersebut, dan sama sekali tidak ada persiapan untuk itu. Bahkan, tanda jalur evakuasi juga tidak ada di kedua daerah ini. Jadi, ketika bencana terjadi mereka akan lari tak tentu arah untuk menyelamatkan diri.

157 dari 200 responden menyatakan bahwasanya baik Lembaga Pemerintahan maupun Non-Pemerintahan tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai mitigasi bencana dalam bentuk apapun seperti baliho, spanduk tentang bencana, sampai datang *door to door* ke rumah warga dalam memberikan pemahaman tentang bencana juga tidak pernah didapatkan oleh warga sekitar daerah bencana. Sistem peringatan bencana juga masih tradisional yaitu dengan melihat air pasang atau tidak dan berwarna keruh apa tidak. Mereka juga mengetahui datangnya bencana banjir dari hewan yang ada di sekitar seperti saat datang banjir, kecoa-kecoa akan menaiki dinding-dinding rumah mereka.

Tabel Informasi tentang bahaya bencana tanah longsor/banjir di Kec. Sei Bingai

Alasan	TS	KS	S	SS	Frekuensi
Mencari Informasi Sendiri	13	19	22	7	61
Penyuluhan dari Dinas Kesbanglinmas	1	4	2	1	8
Penyuluhan dari Dinas Kesbanglinmas, dan penjelasan pamong desa	3	10	1	6	20
Media massa	5	3	2	1	11
Total	22	36	27	15	100

*Data Olahan 2019

Tabel Informasi tentang bahaya bencana tanah longsor/banjir di Kec. Secanggang

Alasan	TS	KS	S	SS	Frekuensi
Mencari Informasi Sendiri	2	8	19	24	53
Penyuluhan dari Dinas Kesbanglinmas	-	2	1	3	6
Penyuluhan dari Dinas Kesbanglinmas, dan penjelasan pamong desa	3	1	7	4	15
Media massa	5	3	16	2	26
Total	10	14	43	33	100

*Data Olahan 2019

Pada tabel tentang informasi bahaya tanah longsor dan banjir di Kecamatan Sei Bingai maupun Kecamatan Secanggang diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa mayoritas responden mendapatkan informasi dari lingkungan mereka atau dari mulut kemulut atau dengan kata lain mencari informasi sendiri. Selebihnya menyatakan mendapat informasi dari pamong desa dalam hal ini kepala dusun atau kepala desa.

Tahapan Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana sebagai suatu proses terencana yang dilakukan

untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui tiga tahapan sebagai berikut:

1. Prabencana

Tahapan penanggulangan bencana pada kondisi sebelum kejadian (prabencana) meliputi: a. Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan adalah tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. b. Peringatan Dini Langkah ini diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum bencana datang. c. Mitigasi Bencana Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.21 tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

2. Saat kejadian bencana

Diperlukan langkah-langkah seperti tanggap darurat untuk dapat mengatasi kejadian bencana.

3. Pasca Bencana

Setelah proses tanggap darurat telah dilewati, langkah berikutnya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan public atau masyarakat sampai ttingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, pada tingkat pemerintahan masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian,

social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Kewaspadaan Masyarakat

Kewaspadaan menjadi kata yang penting bagi penduduk Indonesia karena bencana alam merupakan hal yang rutin dan bisa terjadi setiap saat. Letak Indonesia yang merupakan pertemuan lempeng dunia, yakni Indo-Australia, Eurasia, Pasifik, serta lempeng Filipina di sekitar Maluku membuat wilayah Indonesia rutin mengalami bencana, seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan bencana terbesar di dunia.

Kewaspadaan berarti kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU RI No.24 Tahun 2007).

Adapun kegiatan kesiapsiagaan secara umum adalah: (1) kemampuan menilai resiko; (2) perencanaan siaga; (3) mobilisasi sumberdaya; (4) pendidikan dan pelatihan; (5) koordinasi; (6) mekanisme respon; (7) manajemen informasi; (8) gladi/ simulasi

Berdasarkan hasil yang didapat baik di Kecamatan Sei Bingai maupun Kecamatan Secanggang, masyarakat belum melakukan kegiatan kesiapsiagaan seperti yang telah disebutkan di atas dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang jelas baik dari lembaga formal maupun non-formal yang ada. Untukantisipasi sederhana apabila terjadi bencana seperti menyimpan benda-benda berharga yang

masyarakat miliki ataupun surat keterangan pendidikan (ijazah), surat keterangan kepemilikan rumah dan tanah (sertifikat tanah), menyimpan kepemilikan seperti emas dan uang dalam satu lokasi atau tempat tertentu yang cukup aman, masyarakat pun belum melakukan itu. Tidak adanya sosialisasi di wilayah mereka secara maksimal tentang pentingnya memiliki kewaspadaan terhadap bencana alam menjadikan minimnya kewaspadaan yang ada di 2 (dua) kecamatan tersebut.

Dikarenakan adanya penelitian ini, beberapa cara agar masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana menjadi masyarakat waspada dan siaga (MaWasGa) terhadap bencana yang kemungkinan akan melanda wilayah ialah dengan menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan siaga bencana dengan menyimpan barang-barang berharga di satu tas jadi ketika bencana datang mereka dapat dengan mudah membawanya. Adapun tas ini dinamakan "Tas Gadar" yaitu tas gawat darurat, tas ini berisikan barang-barang penting seperti surat tanah, akta kelahiran, emas, baju secukupnya dan sebagainya.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus melakukan sosialisasi secara berkala melakukan penyuluhan mengenai mitigasi bencana kepada masyarakat dengan cara *door to door* atau bisa menggunakan cara-cara unik seperti kegiatan rutin setiap minggu melakukan senam siap bencana agar masyarakat dapat menjadi masyarakat waspada dan siaga (MaWasGa) terhadap bencana yang akan datang.

Membuat komunitas sadar bencana di kedua daerah tersebut agar dengan adanya komunitas ini masyarakat banyak

memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai mitigasi bencana.

SIMPULAN

Komunikasi Mitigasi Bencana yang dilakukan oleh Lembaga Pemerintahan maupun Non-Pemerintahan dalam menangani mitigasi bencana yang terjadi di Wilayah Langkat yaitu Kecamatan Sei Bingai dan Kecamatan Secanggang masih belum melakukan sosialisasi mitigasi bencana secara maksimal tentang pentingnya memiliki kewaspadaan terhadap bencana banjir dan tanah longsor

Masyarakat belum melakukan kegiatan kesiapsiagaan seperti (1) kemampuan menilai resiko; (2) perencanaan siaga; (3) mobilisasi sumberdaya; (4) pendidikan dan pelatihan; (5) koordinasi; (6) mekanisme respon; (7) manajemen informasi; (8) gladi/ simulasi dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang jelas baik dari lembaga formal maupun non-formal yang ada. Untuk antisipasi sederhana apabila terjadi bencana seperti menyimpan benda-benda berharga yang masyarakat miliki ataupun surat keterangan pendidikan (ijazah), surat keterangan kepemilikan rumah dan tanah (sertifikat tanah), menyimpan kepemilikan seperti emas dan uang dalam satu lokasi atau tempat tertentu yang cukup aman, masyarakat pun belum melakukan itu. Tidak adanya sosialisasi di wilayah mereka secara maksimal tentang pentingnya memiliki kewaspadaan terhadap bencana alam menjadikan minimnya kewaspadaan yang ada di 2 (dua) kecamatan tersebut.

Beberapa cara agar masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana menjadi masyarakat waspada dan

siaga (MaWasGa) terhadap bencana yang kemungkinan akan melanda wilayah mereka yaitu membuat “Tas Gadar” atau gawat darurat untuk menyimpan barang-barang penting di satu tas agar memudahkan mereka saat terjadi bencana. Lalu, membuat program-program unik terkait mitigasi bencana seperti program rutin mingguan senam siap bencana. Kemudian, pemerintah baik formal maupun non-formal membuat komunitas sadar bencana yang melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat di Kecamatan Sei Bingai dan Kecamatan Secanggang.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. Potensi Ancaman Bencana. Diakses pada November 13, 2019, dari <https://bnpb.go.id/potensi-ancaman-bencana>
- BPBD. Pengertian Mitigasi Bencana. Diakses pada September 9, 2019, dari <http://bpbdkaranganyarkab.go.id/?cat=17>
- Effendy, O.U. (2013). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Haddow, G.D. dan Haddow, K.S. (2014). Disaster Communication in A Changing Media World. Oxford: Butterworth-Heinemann
- Hafida, S.H.N. (2019). Perubahan Kesiapan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Erupsi Gunung Berapi. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*: 11 (2) 396-407.
- Lubis. F.W. Sabarina, Y. & Masril. M. (2019). Penanganan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Ditinjau dari Aspek Komunikasi dan Koordinasi. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Comunication Study*. 5 (1): 1-22
- Maryani. (2002). Model Sosialisasi Mitigasi pada Masyarakat Daerah Rawan Bencana di Jawa Barat. Bandung: Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS UPI.
- Peraturan Pemerintah (PP) No.21 tahun 2008.
- Rudianto, (2015), Komunikasi dalam Penanggulangan Bencana, *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Comunication Study*, 1 (1): 51-61
- Sitorus, S.S Hendra, Y. & Jamil, B (2018). Proses Komunikasi Organisasi dalam Koordinasi Pelaksanaan Operasi Pencarian Dan Pertolongan Oleh Kantor Search And Rescue Medan, *PERSPEKTIF*, 6 (2): 53-63
- Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU RI No.24 Tahun 2007